



BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 180/II / 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah di ubah dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Konflik Sosial (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial tingkat Kabupaten/Kota;
- b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten/Kota;
- c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
- d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
- e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
- f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

KETIGA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Luwu Utara melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan konflik sosial melalui Bupati yang selanjutnya Bupati melaporkan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

KEEMPAT

Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA masing – masing Perangkat Daerah/instansi Tahun Anggaran 2017.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 Februari 2017


BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 180/ II /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

KETUA	: BUPATI
WAKIL KETUA I	: SEKRETARIS DAERAH
WAKIL KETUA II	: KAPOLRES LUWU UTARA
WAKIL KETUA III	: DANDIM 1403 SAWERIGADING
WAKIL KETUA IV	: KAJARI MASAMBA
SEKRETARIS	: KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
WAKIL SEKRETARIS I	: ASISTEN PEMERINTAHAN UMUM DAN KESRA
WAKIL SEKRETARIS II	: KABAG OPS POLRES LUWU UTARA
WAKIL SEKRETARIS III	: KASI OPS KODIM 1403 SAWERIGADING
ANGGOTA	: 1. ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN
	2. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	3. KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	4. KEPALA INSPEKTORAT KAB. LUWU UTARA
	5. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	6. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	7. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	8. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	9. KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	10. KEPALA DINAS SOSIAL
	11. KEPALA DINAS SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN
	12. KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	13. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	14. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
	15. KEPALA DINAS KESEHATAN
	16. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
	17. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	18. KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI LUWU UTARA
	19. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU UTARA
	20. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB LUWU UTARA
	21. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB LUWU UTARA

22. CAMAT SE KABUPATEN LUWU UTARA
23. SEKRETARIS BADAN KESBANG DAN POLITIK
24. KEPALA BIDANG INTEGRASI BANGSA
25. KEPALA BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN DEMOKRASI

SEKRETARIAT

- :
1. KASUBID PERMASALAHAN AKTUAL
 2. KASUBID PEMBAURAN KEBANGSAAN
 3. KASUBAG KEUANGAN
 4. KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN
 5. OPERATOR 3 ORANG

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	/
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	/

BUPATI LUWU UTARA

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45/ 180 / II /2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	CAPAIAN (%)	KET
1	2	3	4	5	7	8
A. PENCEGAHAN KONFLIK						
1. KONFLIK SOSIAL						
a. Pemeliharaan kondisi damai dalam masyarakat						
Pemberdayaan Tokoh Masyarakat dalam pemantapan wawasan kebangsaan sesuai 4 konsensus dasar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI)	- Badan Kesbangpol Kab. Luwu Utara - Dinas Pemuda dan Olahraga - Dinas Pendidikan - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Kemenag Luwu Utara - Dinas Sosial - Dinas Satpol PP dan Damkar - Dinas Kominfo - Polres Luwu Utara - Kodim 1403 - Sawerigading - Camat - FKUB, FKDM, FPK	Penguatan SKPD, instansi terkait dan peran Tokoh Masyarakat dalam menyebar nilai kebangsaan dan toleransi	Meningkatnya SKPD/instansi terkait dan peran tokoh masyarakat dalam menyebar nilai toleransi melalui kegiatan dialog/diskusi wawasan kebangsaan oleh tokoh agama, pemuda dan masyarakat.	Target : - Terlaksananya dialog pemantapan wawasan kebangsaan antara tokoh masyarakat, masyarakat,	

1	2	3	4	5	7	8
Melaksanakan sosialisasi nilai – nilai yang terkandung dalam masyarakat sesuai 4 konsensus dasar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI)	Dinas Kominfo	- Kantor Kemenag Luwu Utara - Bakesbangpol - Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Polres Luwu Utara - Kodim 1403 SWG - Camat	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan sikap toleransi masyarakat sehingga menekan potensi konflik	agama dan tokoh adat - Terlaksananya dialog kebangsaan dengan OKP, Ormas dan LSM - Terlaksananya sosialisasi pembentukan karakter bangsa terhadap pelajar SMP dan SMA/ sederajat - Terlaksananya sosialisasi kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak		
Peningkatan Kesadaran Hukum di Masyarakat	- Kejaksaan Luwu Utara - Bagian Hukum Setdakab Luwu Utara	- Dinas Kominfo - Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Polres Luwu Utara - Kodim 1403	Terselenggaranya program penyuluhan hukum di masyarakat	- Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat - Meningkatkan hukum kepetuhan masyarakat Target : Terlaksananya		

1	2	3	4	5	7	8
		Sawerigading - Camat		penyuluhan hukum di 12 kecamatan di Kab. Luwu Utara		

b. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai

Penyusunan kesepakatan bersama yang memuat penyelesaian perselisihan secara damai	Badan Kesbangpol	- Dinas Kominfo - Kantor Kemenag Luwu Utara - Dinas Sosial - Polres Luwu Utara - Kodim 1403 Sawerigading - Bagian Hukum Setdakab Luwu Utara - Dinas Pemuda dan Olahraga - Camat	Tersusunnya kesepakatan bersama tentang penyelesaian konflik secara musyawarah mufakat dimasyarakat	Terbitnya kesepakatan lintas SKPD/instansi yang memuat penyelesaian perselisihan secara damai.
				Target : - Tersusunnya draf kesepakatan bersama - Pengesahan kesepakatan bersama - Terbentuknya tim sosialisasi kesepakatan bersama - Tersosialisasinya kesepakatan bersama

c. Meredakan potensi konflik

Peningkatan transparansi dalam penyelenggaraan PemiluKada	Badan Kesbangpol	- BKPSDM - Dinas Kominfo - Dinas Satpol PP dan Damkar - Inspektorat - Asisten Pemerintahan Polres Luwu Utara - Kodim 1403 SWG - Bagian Hukum - Camat	Meningkatnya netralitas dalam PemiluKada	Terpublikasinya tahapan dan proses pengambilan keputusan dalam setiap tahapan PemiluKada. Target : Terpublikasinya tahapan PemiluKada Gubernur sulsel 2018
Percepatan pemetaan Batas Wilayah Administrasi Desa / Kecamatan /Kabupaten	Asisten Pemerintahan Tata	- DPMD - Kepala Kantor Pertanahan Kab. Luwu	Adanya data batas wilayah administrasi yang	Terselesaikannya batas permasalahan wilayah dengan ditanda

1	2	3	4	5	7	8
Penyelesaian status keberadaan desa dalam kawasan hutan	- Bappeda - Dinas Sosial	Utara Bagian Hukum Bagian Pemerintahan Camat	bermasalah	tangannya kesepakatan bersama kabupaten yangbermasalah Target : - Pembahasan permasalahan batas – batas wilayah - Penyusunan draf berita acara kesepakatan - Penandatanganan berita acara kesepakatan batas desa/kecamatan /kabupaten		
	- Dinas Sosial - DPMMD - Asisten Pemerintahan - Kabag Pemerintahan - Kabag Hukum - Kantor Pertanahan Kab. Luwu Utara	Tata	Adanya penyelesaian wilayah desa dalam kawasan hutan	- Teridentifikasinya wilayah desa yang berada di kawasan hutan untuk diselesaikan kasus hukumnya - Usulan ke Gubernur tentang penyelesaian keberadaan desa dalam kawasan hutan - Disahkannya revisi RTRWP - Teridentifikasinya masyarakat adat yang berada dalam kawasan hutan - Usulan ke Gubernur tentang hak masyarakat adat yang berada dalam kawasan hutan		

1	2	3	4	5	7	8
Peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan tanah	Kantor Pertanahan Kab. Luwu Utara	- DPMPTSP - Satpol PP dan Damkar - Dinas Lingkungan Hidup - Polres Luwu Utara - Kodim 1403 - Sawerigading - Camat	Tidak adanya tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak/perusahaan	Dicabutnya izin atau penghapusan hak atas tanah perusahaan yang terbukti melantarkan tanah.		
Peningkatan pengawasan terhadap wilayah pertambangan	Dinas Penanaman Modal dan Peleayanan Terpadu Satu Pintu	- Satpol PP dan Damkar - Dinas Lingkungan Hidup - Polres Luwu Utara - Kodim 1403 - Sawerigading - Camat	Telah adanya tumpang tindih di wilayah perizinan	Terselesaikannya permasalahan tumpang tindih izin pertambangan. Target : - Pendataan luas wilayah IUP dan luas wilayah yang tumpang tindih di propinsi/kab - Merekomendasikan penyelesaian masalah tumpang tindih perizinan		
Peningkatan kemampuan aparat untuk menghentikan kekerasan dalam menangani konflik sosial	Polres Luwu Utara	- Badan Kesbangpol - Dinas Sosial - Kodim 1403 - Sawerigading - Satpol PP dan Damkar - Camat	Meningkatnya profesi aparat untuk menghentikan kekerasan fisik dalam menangani konflik sosial	Terlaksananya pelatihan bersama Tim Terpadu Target : - Menyusun draf pelatihan bersama - Terlaksananya pelatihan bersama di		

1	2	3	4	5	7	8
Penyusunan pembiayaan kegiatan terkait penanganan konflik	Bappeda	Seluruh SKPD	Tersedianya alokasi anggaran penanganan konflik	Polres/SKPD - Adanya pengusulan dari masing - masing SKPD - Keputusan alokasi anggaran atas usulan SKPD		

d. Membangun sistem peringatan dini

Mengsinergikan sistem peringatan dini di wilayah Kab. Luwu Utara	Badan Kesbangpol	- Polres Luwu Utara 1403 - Kodim - Sawerigading - BPPD - Dinas Sosial - Dinas Kominfo - Satpol PP dan Damkar - Dinas Pemuda dan Olahraga - Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Kominda - Camat - FKUB, FPK dan FKDM - Kantor Kemenag Kab. Luwu Utara - Dinas Pendidikan - Dinas Kominfo - BPPD	Terdeteksinya potensi konflik dan terinformasinya potensi konflik kepada pihak terkait	Tersedianya kesepakatan bersama yang memuat sistem peringatan dini dengan mengikutsertakan masyarakat. Target : - Terbentuknya pokja penyusunan draf kesepakatan bersama dengan SKPD/instansi terkait dengan masyarakat - Terbentuknya Tim Sosialisasi - Kesepakatan bersama. Terinformasinya peta potensi konflik di Penda		
Memberdayakan peran FKUB, FKDM, FPK, Kominda dan Ormas lainnya	Badan kesbangpol		Meningkatkan peran forum – forum dalam masyarakat (FKUB, FPK, FKDM, Kominda dan Ormas)	Terlaksananya dialog kemitraan kerjasama antar elemen masyarakat di 12 kecamatan		

1	2	3	4	5	7	8
		- Polres Luwu Utara - Kodim 1403 SWG - Dinas Sosial - Camat				

2. AKSI TERORISME						
Mengoptimalkan upaya pencegahan terorisme	Badan Kesbangpol	- Kantor Kemenag Luwu Utara - Dinas Pemuda dan Olahraga - Dinas Kominfo - Polres Luwu Utara - Kodim 1403 SWG - Kominda, FKUB, FPK dan FKDM	Meningkatnya upaya pencegahan terorisme	Terlaksananya upaya pencegahan terorisme di Kab. Luwu Utara Target : - Identifikasi tempat yang berpotensi berkembangnya radikalisme - Terlaksananya pelatihan pencegahan terorisme kepada masyarakat - Terlaksananya sosialisasi/dialog bahaya radikalisme terhadap Ormas dan Pondok Pesantren		

B. PENGHENTIAN / PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DAN TERORISME						
Penyelesaian konflik sosial berlatar belakang lahan/SDA	Asisten Pemerintahan	Tata	Terselesaikannya akar masalah konflik sosial berlatar belakang lahan	Terselesaikannya kasus sosial berlatar belakang lahan/SDA		
		- Kantor Pertanahan - Dinas Pemukiman dan Perumahan - Polres Luwu Utara - Kodim 1403 SWG - Kabag Pemerintahan - Kabag Hukum - Kominda		Target : - Inventarisasi jumlah kasus konflik sosial berlatar belakang		

1	2	3	4	5	7	8
Penyelesaian konflik sosial bernuansa SARA	Badan Kesbangpol	- Camat - Kantor Kemenag - Dinas Pemuda dan Olahraga - Dinas Pendidikan - Dinas Kominfo - Polres Luwu Utara - Kodim 1403 SWG - Camat - FKUB, FPK dan FKDM	Terselesaikannya akar masalah konflik sosial bernuansa SARA	lahan/SDA - Terpetaikannya persebaran konflik dan potensi konflik sosial berlatar belakang lahan/SDA - Terbentuknya Tim Terpadu tingkat kabupaten - Terlaksananya sosialisasi Tim Terpadu tingkat kabupaten		
Penyelesaian konflik sosial berlatar belakang industri/perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	- Dinas Sosial - Dinas Kominfo - Polres Luwu Utara - Kodim 1403 SWG - Kominda	Terselesaikannya akar masalah konflik sosial berlatar belakang industri atau perusahaan	- Terselaikannya kasus konflik sosial berlatar belakang industri atau perusahaan		

1	2	3	4	5	7	8
		- Camat		Target : - Inventarisasi jumlah kasus konflik sosial berlatar belakang industri perusahaan - Terpetakannya persebaran konflik dan potensi konflik sosial berlatar belakang industri atau perusahaan - Terbentuknya Tim Terpadu tingkat kabupaten - Terlaksananya sosialisasi Tim Terpadu tingkat kabupaten		
C. PEMULIHAN PASCA KONFLIK						
Percepatan pelaksanaan rekonsiliasi pasca konflik	Badan Kesbangpol	- Dinas Sosial - BPBD - Kantor Kemendagri Luwu Utara - Polres Luwu Utara - Kodim 1403 SWG - Dinas Kominfo - Camat	terselesaikannya konflik antar pihak melalui rekonsiliasi	Target : - Terbentuknya Tim Terpadu lintas SKPD/instansi terkait - Terlaksananya rekonsiliasi antar pihak yang di mediasi oleh Tim Terpadu		
Penyiapan tenaga pendamping pemulihan pasca konflik	Dinas Kesehatan	- Dinas Pemuda - Dinas Sosial - Dinas Kominfo - BPBD - Badan Kesbangpol	Pemulihan kondisi psikologis korban konflik	Tersedianya tenaga terlatih sebagai pendamping korban konflik di Kab. Luwu Utara		

1	2	3	4	5	7	8
Penyelesaian konflik sosial bernuansa SARA	Badan Kesbangpol	- Camat	Terselesaikannya akar masalah konflik sosial bernuansa SARA	- lahan/SDA - Terpetakannya persebaran konflik dan potensi konflik sosial berlatar belakang lahan/SDA - Terbentuknya Tim Terpadu tingkat kabupaten - Terlaksananya sosialisasi Tim Terpadu tingkat kabupaten		
		- Kantor Kemenag - Dinas Pemuda dan Olahraga - Dinas Pendidikan - Dinas Kominfo - Polres Luwu Utara - Kodim 1403 SWG - Camat - FKUB, FPK dan FKDM		Terseselesaikannya kasus sosial bernuansa SARA Target : - Inventarisasi jumlah kasus konflik sosial bernuansa SARA - Terpetaikannya persebaran konflik dan potensi konflik sosial bernuansa SARA - Terbentuknya Tim Terpadu tingkat kabupaten - Terlaksananya sosialisasi Tim Terpadu tingkat kabupaten		
Penyelesaian konflik sosial berlatar belakang industri/perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	- Dinas Sosial - Dinas Kominfo - Polres Luwu Utara - Kodim 1403 SWG - Kominda	Terselesaikannya akar masalah konflik sosial berlatar belakang industri atau perusahaan	- Terseselesaikannya kasus konflik sosial berlatar belakang industri atau perusahaan		

1	2	3	4	5	7	8
Pembangunan kembali sarana fasilitas umum dan sosial diwilayah pasca konflik	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	- Polres Luwu Utara - Kodim 1403 SWG - Camat - Bappeda - Dinas Sosial - BPBD - Dinas Pemuda - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan - Badan Kesbangpol - Camat	Beroperasinya kembali sarana fasilitas umum diwilayah pasca konflik	Terbangunnya kembali sarana fasilitas umum dan sosial yang rusak akibat konflik sosial Target : - Teridentifikasi kerusakan akibat konflik - Teridentifikasi potensi yang dapat digunakan - Terlaksananya koordinasi antar SKPD dalam rangka pembangunan kembali sarana dan fasilitas umum.		

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	


BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI